



Ayah Tiri Diduga Perkosa Anak Tiri Selama 3 Tahun, Terungkap Setelah Korban Hamil

kabartuban.com - Rumah yang seharusnya menjadi perlindungan paling aman, justru berubah menjadi penjara ketakutan bagi seorang remaja perempuan berusia 16 tahun sebut saja Mawar (nama samaran) di Kabupaten Tuban. Selama lebih dari tiga tahun, ia terpaksa menyimpan rapat sebuah rahasia kelam, di bawah bayang-bayang ancaman ayah tirinya, WNN (55).

Langkah kaki WNN yang mendekati kamarnya selalu menjadi awal dari mimpi buruk. Dengan dalih menawarkan pijatan saat rumah sedang lengah, pria paruh baya itu justru melancarkan aksi kejahatannya. Tak hanya sekali, tindakan asusila itu terjadi berulang kali hingga tak kurang dari 40 kali sejak Mei 2023. Aksi terakhir bahkan baru berhenti pada Selasa (12/7/2026) lalu.

Korban yang masih berstatus pelajar ini memilih bungkam bukan karena rela, melainkan karena rasa takut yang teramat besar kepada sang ayah tiri. Ia tak berani mengadu, bahkan kepada ibu kandungnya sendiri.

Namun, perubahan fisik tidak bisa berbohong. Rahasia kelam itu perlahan terkuak saat kandungan korban memasuki usia 34 minggu. Beruntung, ibu korban yang menaruh curiga dengan kondisi badan korban segera bergerak, melaporkan situasi tersebut ke pihak kepolisian.

“Korban baru ketahuan setelah perutnya membesar. Karena masih di bawah umur, korban sangat takut dengan ayah tirinya sehingga tidak berani mengadu ke ibunya,”

ujar Kasat Reskrim Polresta Tuban, AKP Bobby Wirawan Wicaksono Elsam, dalam konferensi pers, Jumat (17/7/2026).

Mendapat laporan memilukan tersebut, Satreskrim Polres Tuban bergerak cepat. Tanpa perlawanan berarti, WNN berhasil diringkus petugas pada Kamis (16/7/2026).

Selain menangkap pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti krusial untuk memperkuat proses hukum di pengadilan. Di antaranya, Hasil visum et repertum korban, Pakaian korban (baju dan celana pendek), Pakaian dalam korban.

Kini, WNN harus bertukar kamar dengan....

[Baca Selengkapnya....](#)

Bulan Suro Jadi Berkah Emak-emak Tuban, Mayoritas Harga Bahan Pokok Stabil dan Cenderung Turun

kabartuban.com - Upaya peredaran narkoba di Kabupaten Tuban kembali digagalkan aparat kepolisian. Satresnarkoba Polresta Tuban membongkar jaringan peredaran sabu di Kecamatan Semanding dengan menangkap tiga pria yang diduga berperan sebagai pengedar. Dari tangan para tersangka, polisi menyita 27 paket sabu dengan berat total 5,63 gram yang siap diedarkan.

Pengungkapan tersebut berawal dari informasi masyarakat mengenai aktivitas peredaran narkoba di wilayah Kecamatan Semanding. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, petugas akhirnya menggerebek sebuah rumah di Gang Besaran, RT 02/RW 05, Desa Bejagung, Senin (22/6/2026) sekitar pukul 21.00 WIB.

tiga tersangka masing-masing berinisial YTA (30), YDS (31), dan TA (27), yang seluruhnya merupakan warga Kecamatan Semanding.

Selain menangkap ketiga tersangka, petugas juga menyita barang bukti berupa 27 paket sabu siap edar dengan berat bersih 5,63 gram, sejumlah sedotan plastik yang diduga digunakan sebagai alat pengemasan, sebuah kotak bekas cotton bud, satu unit sepeda motor Yamaha NMAX, uang tunai Rp150 ribu yang diduga hasil transaksi narkoba, serta barang bukti pendukung lainnya.

Kasat Resnarkoba Polresta Tuban AKP Harjo mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil....

[Baca Selengkapnya....](#)



Dalam operasi itu, polisi mengamankan

Plh Kejari Tuban Akui Ada Indikasi Dugaan Suap, Hasil Pemeriksaan Sudah Diserahkan ke Kejagung

kabartuban.com – Pelaksana Harian (Plh) Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Tuban, Abdul Rasyid mengakui adanya indikasi dugaan suap dalam penanganan perkara tambang ilegal yang saat ini tengah menjadi sorotan publik. Dugaan tersebut menjadi dasar dilakukannya pemeriksaan internal terhadap sejumlah oknum jaksa oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Meski demikian, Rasyid menegaskan bahwa pihaknya belum dapat membeberkan secara rinci bentuk dugaan pelanggaran tersebut karena seluruh proses pemeriksaan kini berada di bawah kewenangan Kejaksaan Agung.

“Ada indikasi perbuatan tercela. Bentuknya seperti apa nanti biar dijelaskan oleh Kejati melalui bidang penerangan hukum,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (15/7/2026).

Ia menjelaskan, istilah “perbuatan tercela” tidak serta-merta berarti telah terjadi tindak pidana suap. Menurutnya, dugaan pelanggaran yang diperiksa masih dapat berupa berbagai bentuk pelanggaran, mulai dari dugaan suap hingga pelanggaran terhadap standar operasional prosedur (SOP).

“Perbuatan tercela itu bisa ada suap, bisa juga ada pelanggaran SOP. Semua masih dalam proses pemeriksaan,” katanya.



Plh Kajari juga mengungkapkan bahwa empat pejabat yang sebelumnya menangani perkara tersebut telah ditarik dan di copot dari Kejari Tuban. Mereka terdiri dari Kepala Kejaksaan Negeri Tuban, Supardi, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Ahmad Ahsan, Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubbagbin), serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Ubab Shohibul Mahali, yang menangani perkara tambang ilegal.

Menurutnya, langkah tersebut merupakan bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kejati Jawa Timur.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Tuban, Stephan Dian Palma, ditunjuk merangkap sebagai Pelaksana harian (Plh) Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum).

Sementara itu, jabatan Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubbagbin) untuk sementara diisi oleh Pelaksana Harian (Plh) dari Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun).

Ia menambahkan, hasil pemeriksaan yang dilakukan Kejati Jawa Timur telah disampaikan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) di Kejaksaan Agung. Saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung sehingga pihaknya belum dapat menyampaikan hasil ataupun kesimpulan.

“Hasil pemeriksaan dari Kejati sudah dikirim ke bidang pengawasan Kejaksaan Agung dan prosesnya masih berjalan,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai kemungkinan

[Baca Selengkapnya....](#)



Diduga Terima Suap Rp600 Juta, Mantan Kajari Tuban Diperiksa Kejaksaan Agung, Empat Pejabat Dicopot

kabartuban.com – Penanganan perkara tambang ilegal di Kabupaten Tuban berbuntut panjang. Mantan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tuban, Supardi, diduga menerima suap sebesar Rp600 juta terkait penanganan perkara tersebut. Dugaan itu kini menjadi perhatian Kejaksaan Agung dan berujung pada pencopotan sejumlah pejabat di lingkungan Kejaksaan Negeri Tuban.

Pelaksana Harian (Plh) Kajari Tuban Abdul Rasyid membenarkan bahwa empat pejabat yang sebelumnya menangani perkara tambang ilegal telah ditarik dan dicopot dari jabatannya sebagai bagian dari proses pemeriksaan internal yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

Keempat pejabat tersebut yakni mantan Kajari Tuban Supardi, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum) Ahmad Ahsan, Kepala Subbagian Pembinaan (Kasubbagbin), serta Jaksa Penuntut Umum (JPU) Muhammad Ubab Shohibul Mahali yang menangani perkara tambang ilegal.

Menurut Abdul Rasyid, langkah penonaktifan tersebut dilakukan untuk mempermudah proses pemeriksaan yang saat ini masih berlangsung di bidang pengawasan.

“Seluruh proses masih berjalan. Hasil pemeriksaan dari Kejati sudah dikirim ke bidang pengawasan Kejaksaan Agung dan prosesnya masih berjalan,” ujarnya

Ia menegaskan, pihaknya belum dapat menyampaikan hasil maupun kesimpulan pemeriksaan karena seluruh proses masih berada dalam tahap pendalaman oleh tim pengawas.

Untuk mengisi kekosongan jabatan, Kejaksaan Negeri Tuban melakukan penunjukan pejabat pelaksana harian. Kepala Seksi Intelijen Stephan Dian Palma dipercaya merangkap sebagai Plh Kasi Pidum, sementara jabatan Kasubbagbin diisi sementara oleh Plh dari Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Kasi Datun).

Saat ditanya oleh awak media mengenai informasi dugaan penerimaan suap sebesar Rp600 juta oleh Supardi, Abdul Rasyid tidak memberikan bantahan secara tegas. Ia hanya menjawab singkat, “Lah, itu kamu sudah tahu gitu.”

Sebagai pimpinan sementara di Kejari Tuban, ia mengaku telah mengumpulkan seluruh pegawai untuk mengingatkan agar setiap penanganan....

[Baca Selengkapnya....](#)



Gedung Belum Rampung, Tahun Ajaran Baru Sekolah Rakyat Tuban Mundur hingga Akhir Juli

kabartuban.com - Harapan ratusan siswa untuk memulai tahun ajaran baru 2026/2027 di Sekolah Rakyat (SR) Terintegrasi 18 Kabupaten Tuban pada pertengahan Juli harus tertunda. Penyebabnya, pembangunan gedung sekolah yang akan digunakan sebagai lokasi pembelajaran belum rampung sehingga kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) maupun proses belajar mengajar belum dapat dilaksanakan.

Semula, MPLS bagi peserta didik baru dijadwalkan berlangsung pada 13 Juli 2026 sesuai kalender pendidikan. Namun, kegiatan tersebut diundur hingga 31 Juli 2026 sambil menunggu penyelesaian pembangunan gedung sekolah.

Kepala SR Terintegrasi 18 Tuban, Vera Khoirun Nissa, mengatakan penjadwalan awal mengikuti arahan pemerintah pusat. Namun, kondisi pembangunan di lapangan membuat jadwal tersebut tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

“Sesuai kalender pendidikan, MPLS seharusnya dilaksanakan pada 13 Juli, sedangkan yang murid lama masuk tanggal 31 juli. Harapannya peserta didik baru dapat mengikuti pengenalan lingkungan sekolah sebelum seluruh siswa masuk. Namun karena gedung permanen belum selesai dibangun, kami harus menunggu hingga bangunan benar-benar siap digunakan,” ujarnya.

Vera menjelaskan, kontrak pembangunan sekolah dijadwalkan berakhir pada 25 Juli 2026. Sebelum serah terima, pada 24 Juli akan dilakukan peninjauan untuk memastikan seluruh fasilitas, termasuk sarana dan prasarana pendukung, telah memenuhi standar operasional.

Ia mengakui keterlambatan pembangunan berdampak pada tertundanya proses pembelajaran. Saat sekolah-sekolah lain telah memulai tahun ajaran baru, siswa Sekolah Rakyat Tuban masih harus menunggu hingga akhir Juli.

Meski demikian, pihak sekolah telah menyiapkan strategi agar ketertinggalan materi dapat dikejar setelah kegiatan belajar dimulai.

“Kami akan melakukan penyesuaian pembelajaran dengan memadatkan materi sehingga capaian belajar siswa tetap dapat mengikuti sekolah lain,” katanya.

elama masa penundaan, pihak sekolah juga terus melakukan pendampingan kepada calon peserta didik beserta orang tua agar tetap mendapatkan informasi mengenai persiapan masuk sekolah.

“Kami terus memberikan pendampingan kepada siswa dan wali murid agar mereka memahami kondisi yang terjadi dan tetap siap ketika kegiatan belajar dimulai,” tambah Vera.

[Baca Selengkapnya...](#)



Tambang Berizin di Tuban Bertambah, Pemkab Akui Tak Punya Wewenang Menindak Tambang Ilegal

kabartuban.com - Aktivitas pertambangan di Kabupaten Tuban terus menunjukkan geliat. Jumlah perusahaan yang telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) bertambah dalam beberapa bulan terakhir. Namun di balik meningkatnya usaha tambang tersebut, Pemerintah Kabupaten Tuban mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menindak tambang ilegal maupun perusahaan yang mengabaikan kewajiban reklamasi pascatambang.

Data terbaru dari Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA) Setda Tuban mencatat, hingga pertengahan Juli 2026 terdapat 34 lokasi tambang yang telah mengantongi IUP. Jumlah itu meningkat dibandingkan April 2026 yang masih tercatat 29 titik.

Tak hanya itu, jumlah izin eksplorasi juga mengalami kenaikan. Dari sebelumnya 61 lokasi, kini menjadi 73 titik. Meski demikian, pemerintah daerah belum memiliki pemetaan pasti mengenai jumlah tambang yang beroperasi tanpa izin.

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Tuban, Handrijanto, menjelaskan bahwa sejak berlakunya regulasi terbaru di sektor mineral dan batu bara, sebagian besar kewenangan pengelolaan pertambangan telah dialihkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Perizinan sekarang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Kami hanya...

[Baca Selengkapnya...](#)